

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT  
RESOR LOMBOK TENGAH**

---

**DAFTAR PILUN BAG REN  
POLRES LOTENG TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>NOMOR/TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>	<b>JML</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	SKEP	KEP/20/IX/2005, TANGGAL 07 SEPTEMBER 2005	RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2005-2009 (RENSTRA POLRI).	35	
2.		SKEP/1/I/2008, TANGGAL 18 JANUARI 2008	TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN POLRI		
3.		SKEP/102/II/2006, TANGGAL 09 FEBRUARI 2006	BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DILINGKUNGAN POLRI.		
4.		KEP/522/VI/2014, TANGGAL 30 JUNI 2014	RENCANA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA T. A. 2015.		
5.		KEP/972/XI/2015, TANGGAL 06 NOPEMBER 2015	NORMA INDEKS DI LINGKUNGAN POLRI T.A. 2016.		
6.		KEP/616/VI/2016, TANGGAL 21 JUNI 2016	RENCANA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2017.		
7.		6 TAHUN 2011, TANGGAL 31 MEI 2011	TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.		
8.		B/162/III/2013/SRENA, TANGGAL 15 MARET 2013	PENGIRIMAN SURAT EDARAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN STATUS KESATUAN KEWILAYAHAN.		
9.		KEP/716/IX/2014 TANGGAL 05 SEPTEMBER 2014	NORMA INDEKS DI LINGKUNGAN POLRI T.A. 2015.		
10.		KEP/844/X/2014, TANGGAL 28 OKTOBER 2014	PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN DANA NON APBN PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK VITAL LAINNYA.		
11.		16 TAHUN 2011	PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA.		
12.		06 TANGGAL 09 JUNI 2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA		
13.		14 TAHUN 2011	KODE ETIK PROFESI POLRI.		
13.		14 TAHUN 2011	KODE ETIK PROFESI POLRI.		
14.			HIMPUNAN PERATURAN KAPOLRI BIDANG PEMBINAAN TAHUN 2008-2010		
15.		PERATURAN KAPOLRI NO. POL. : 10 TAHUN 2007	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.		

16.		10 TAHUN 2011 TANGGAL 27 JUNI 2011	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
17.		PROTAP/1/X/2010	PENANGGULANGAN ANARKI		
18.		17 TAHUN 2007 TANGGAL 17 AGUSTUS 2007	TATA KEARSIPAN DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.		
19.		PENYEMPURNAAN PERKAP NOMOR 22 DAN 23 TAHUN 2010	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT POLDA, POLRES DAN POLSEK.		
20.		PENYEMPURNAAN PERKAP NOMOR 22 DAN 23 TAHUN 2010	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT POLDA, POLRES DAN POLSEK.		
21		SOSIALISASI UU NOMOR 7 TAHUN 2012	TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN MASA. PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG CARA LINTAS GANTI DAN PENANGGULANGAN HURU HARA. PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN ANARKIS. PERKAP 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENDIDIKAN SERTA PERATURAN LAIN.		
22			KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN POLRI.		
23		11 TAHUN 2013 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2013	MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
24		PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT LOMBOK TENGAH TAHUN 2011	TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT LOMBOK TENGAH.		
25		25. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TANGGAL 19 MARET 2010	TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.		
26		PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2010	TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN DAN BERITA ACARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 500 BIDANG HUKUM.		
27		SKEP/714/IX/2003 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2003	NASKAH SEMENTARA PETUNJUK ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEKTOR (POLSEK).		
28		SKEP/792/XI/2005 TANGGAL : 10 NOPEMBER 2005	PETUNJUK PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEKTOR (POLSEK).		
29		SKEP/432/VII/2006 TANGGAL 1 JULI 2006	PANDUAN PELAKSANAAN FUNGSI RESKRIM DENGAN PENDEKATAN PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS).		
30		KEP/447/VII/2010, TANGGAL 19 JULI 2010	HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA BIDANG PERENCANAAN DILINGKUNGAN POLRI.		

31		LAMPIRAN NASKAH PENGANTAR RENSTRA POLRI TAHUN 2010-2014	PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA.		
32		KEP/716/IX/2014 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2014	NORMA INDEK DILINGKUNGAN POLRI T.A. 2015.		
33		KEP/972/XI/2015 TANGGAL 6 NOPEMBER 2015	NORMA INDEKS DILINGKUNGAN POLRI T.A 2016.		
34		SKEP/770/XII/2006 TANGGAL 22 DESEMBER 2006	PENOMORAN KODE SATUAN KERJA DILINGKUNGAN UNIT ORGANISASI POLRI T.A. 2007.		
35			EVALUASI IMPELMNTASI SATPOL AIR DI TINGKAT POLRES.		
36	PERKAP	134/PMK.06/2005 DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-66/PB/2005	TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2006.	7	
37		65/PMK.02/2015	STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016.		
38		PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 45/PRT/M/2007	PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA		
39		MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10/PMK.02/2017	TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN 2017		
40			HIMPUNAN PERATURAN/KETENTUAN KEUANGAN NEGARA		
41		PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK.05/2012	TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.		
42		KONSOLIDASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 DAN PERUBAHANNYA	- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 - PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2011 (PERUBAHAN PERTAMA) - PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 (PERUBAHAN KEDUA).		

43	PERATURAN KAPOLDA	KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: KEP/169/VI/2014	TENTANG RENCANA KERJA POLDA NUSA TENGGARA BARAT T.A. 2015.	15	
44			RANCANGAN RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016.		
45		KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : KEP/178/VI/2013	TENTANG RENCANA KERJA POLDA NUSA TENGGARA BARAT T.A.2014.		
46		KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: KEP/180/VI/2012, TANGGAL 27 JUNI 2012	RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013.		
47		KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : KEP/212/2010, TANGGAL 30 JUNI 2010	TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA POLDA NTB T.A. 2010-2014.		
48			SURAT EDARAN PEDOMAN PERENCANAAN KAPOLDA NTB TAHUN 2009.		
49		KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : KEP/131/II/2017,	RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015- 2019 (PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI KEPUTUSAN KAPOLDA NTB NOMOR : KEP/189/v/2015, TANGGAL 27 MEI 2015).		
50		KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : KEP/37/II/2010, TANGGAL 29 JANUARI 2010	RENSTRA POLDA NTB TAHUN 2010-2014.		
51			BUKU PANDUAN PENYUSUNAN KERTAS KERJA RKA-KL DAN TOR/RAB PAGU INDIKATIF T.A 2012.		
52			PANDUAN ACARA PENYUSUNAN TOR DAN RAB SATKER JAJARAN POLDA NTB TAHUN 2008.		
53			PEMBAGIAN TUGAS DAN ANALISA JABATAN POLRES JAJARAN POLDA NTB (YANG BELUM DIATUR DALAM KEP/7/II/2005)		
54			ANALISA DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA POLDA NTB TAHUN 2010-2014.		
55		KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP/606/X/2010 TANGGAL 5 OKTOBER 2010	STANSDAR BIAYA KHUSUS DILINGKUNGAN POLRI T.A. 2011.		

56		KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : KEP/356/XII/2014, TANGGAL 30 DESEMBER 2014	INDIKATOR KINERJA UTAMA POLDA NTB TAHUN 2015-2019.		
57		KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK TENGAH NOMOR : KEP/45/VI/2016 TANGGAL 24 JUNI 2016	KERJA POLRES LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.		

Praya, 11 Juli 2017

KABAG REN



ABDUL HAMID

KOMPOL NRP 60070747